

**Pemikiran Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan:
Analisis CLD KHI-KHI Inpres No 1/1991**

Oleh: Nispul Khoiri
Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Sumatera Utara
nispulkhoiri@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang perdebatan tentang status Rancangan naskah tentang Hukum Keluarga Islam, RUU Hukum Kewarisan Islam dan RUU Hukum Perwakafan Islam versi CLD-KHI yang telah menyita perhatian para pengkaji hukum Islam Indonesia. CLD KHI-KHI Inpres No 1/1991 sebagai sebuah pemikiran hukum Islam tentu saja menarik diperbincangkan, terutama apa saja isu-isu yang dibangun di dalamnya tanpa harus terprovokasi. Tulisan ini menganalisis secara substansial apa saja gagasan yang rancangan yang diajukan CLD KHI-KHI Inpres No 1/1991 tersebut.

Kata Kunci: Pemikiran Hukum Islam, Hukum Perkawinan dan CLD-KHI

Pendahuluan

Mungkin kita masih ingat dalam pikiran kita, sekitar tahun 2003 Departemen Agama RI, menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama (UUHTPA) kepada DPR RI. Gagasan RUUHTPA ini sebagai penyempurnaan materi KHI dengan tujuan meningkatkan status KHI semula dari INPRES No 1/1991 menjadi UU. RUU HTPA kemudian berubah menjadi RUU Hukum Materil Peradilan Agama (HMPA) bidang perkawinan. Persoalan yang cukup menarik ketika RUUHTPA diajukan pada saat yang sama tepatnya pada tanggal 4 Oktober 2004, sebuah TIM yang menyebut namanya dalam "Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI" (Pokja PUG Depag) menggulirkan pula sebuah naskah tandingan rumusan hukum Islam yang disebut "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam" (CLD-KHI). Tujuan rancangan naskah ini digulirkan sebagaimana penjelasan Marzuki Wahid salah seorang TIM kontributor CLD-KHI, menawarkan sejumlah pemikiran pembaharuan tentang Hukum Keluarga Islam, RUU Hukum Kewarisan Islam dan RUU Hukum Perwakafan Islam, yang lebih dipandang demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia dan kesetaraan gender dalam kontek ke Indonesiaan.¹

Meskipun, akhirnya rancangan naskah tentang Hukum Keluarga Islam, RUU Hukum Kewarisan Islam dan RUU Hukum Perwakafan Islam versi CLD-KHI dibekukan oleh Menteri Agama yang saat itu Muhammad Maftuh Basyuni, sehingga terkubur sampai saat ini, namun dalam konteks akademisi, cukup menarik kembali didiskusikan. Paling tidak pemikiran seperti ini harus dilihat lebih tajam dari pesan

¹Marzuki Wahid, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Pasca Orde Baru Dalam Pendekatan Politik: Studi Kasus CLD-KHI. Dalam Generasi Baru Peneliti Muslim di Indonesia Kajian Islam Dalam Ragam Pendekatan Program PIES 2008-2009* (Purwokerto : Australia – Indonesia Institut, 2010) h. 6-7.

dan konteks apa yang akan disampaikan oleh pemikirnya, kemudian metodologi yang dibangun, sehingga kita tidak terlalu cepat terprovokasi untuk menolak, begitu juga tidak terlalu mudah untuk menerima. Perlu ada proses pemikiran yang berkembang walaupun pada akhirnya ada yang menolak atau menerima pemikiran CLD KHI.

Latar Belakang Lahirnya KHI Inpres No 1991 dan Eksistensi

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kompilasi bagian teknik penyusunan hukum di Indonesia selain kodifikasi dan unifikasi. Kompilasi atau *compilation* berasal dari bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda disebut " *compilatie* ".² Kemudian kompilasi " *to compile* " yang bermakna " *to compose out of material from other document* " Artinya : " *Menyusun bahan-bahan dari berbagai dokumen lainnya* " Jadi Kompilasi Hukum Islam (baca, KHI) ialah ; Menyusun bahan-bahan hukum Islam dari berbagai dokumen tentang hukum Islam dengan tata kerja dan terencana.³

Kehadiran KHI dirasakan cukup penting dalam rangka unifikasi hukum di Indonesia khususnya di Peradilan Agama. Karena sebelum lahirnya KHI, Pengadilan Agama tidak mempunyai pedoman untuk memutuskan perkara-perkara diajukan kepadanya, kecuali hukum Islam yang tersebar dalam kitab-kitab fiqh yang disusun oleh para ulama klasik. Konsekwensinya disamping tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian perkara oleh hakim PA berupa ; tidak adanya keseragaman hukum, ketidak jelasan pedoman bagaimana melaksanakan syariah dan akibat yang lebih jauh lagi ketidak mampuan mempergunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam UUD 1945 dan perundangan lainnya.⁴

Prof. H. Busthanul Arifin, SH. Selaku pencetus gagasan ini, menegaskan bahwa : Untuk dapat berlakunya Hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal: (1). Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum Islam itu. (2). Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu. (3). Akibat berkepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya. (4). Di dalam sejarah Islam pernah dua kali di tiga negara, hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara, yaitu : India, masa Raja Al Raijeb yang membuat dan yang memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal

²Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah sebuah buku hukum atau kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan hukum. Pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi, tetapi kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum. A. Rosyadi & M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), h. 94

³Dokumen dimaksudkan di sini mengumpulkan kitab kuning yaitu : 1. *al-Bajuri*, 2. *Fatḥ al-Mu'īn*, 3. *Syarqawi 'Alā al-Tabrīr*, 4. *Qalyubi / Maḥallī*, 5. *Fatḥ al-Wahab dengan syarahnya*, 6. *al-Tuhfah*, 7. *Targhib al-Mustaq*, 8. *Qawanin Syar'iyah li al-Sayyid bin Yahyā*, 9. *Qawanin Syar'iyah li al-Sayyid Saḍḍāq Dahlān*, 10. *Syamsuri fī al-Faraid*, 11. *Bughyab al-Mustarsyidīn*, 12. *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, 13. *Mughnī al-Muḥṭaj*. Departemen Agama RI, Dir. Jend. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Buku KHI di Indonesia*, Tahun 2000, h. 128.

⁴Rosyadi dan Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam*, h. 100.

dengan “*Fatwa Alamfiri*.” Kemudian Kerajaan Turki Usmani, yang terkenal dengan nama majalah “*al-Ahkām al-Adliyah*.” Serta negara Sudan, Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan.

Atas pertimbangan itu berdasarkan SKB Ketua Mahkamah Agung No 07/KMA/1985 dan No 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi yang dikenal sebagai KHI disebutkan:

1. Sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan agama, maka perlu mengadakan KHI untuk dijadikan sebagai hukum positif di Pengadilan Agama.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dan demi peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, maka dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat MA dan Depag RI.⁵

Melalui Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tepatnya tanggal 10 Juni 1991 ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarkan luas KHI. Beragam pandangan menilai KHI dipandang sebagai keberhasilan besar bagi Umat Islam Indonesia pada pemerintah Orde Baru. Umat Islam Indonesia telah mempunyai pedoman fiqh yang seragam menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi. Dilingkungan PA KHI berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa mengadili dan memutuskan perkara-perkara berhubungan dengan keperdataan orang-orang Islam. Ia tidak dihasilkan melalui proses legislasi DPR sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya yang dijadikan sebagai hukum positif, tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagas oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang melibatkan berbagai Perguruan Tinggi Islam di Indonesia

Dari kekuatan hukumnya banyak kalangan menilai, diantaranya Ismail Sunni mengatakan KHI ditetapkan melalui Keputusan Presiden/Instruksi Presiden, dimana dasar hukumnya pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yaitu : “Kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan negara.” Apakah dinamakan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden, kedudukan hukumnya sama.⁶

Untuk mempertegas kedudukan KHI tersebut Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan No 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres RI No 1/1991 yang berlaku 22 Juli 1991 yang berbunyi :

- (a). Bahwa Inpres RI No 1/1991 tanggal 10 Juni 1991, memerintahkan kepada Menteri Agama RI menyebarluaskan KHI agar digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
- (b). Bahwa penyebaran KHI tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

⁵*Ibid*

⁶*Ibid*, h. 104, Ismail Sunny, *KHI Ditinjau Dari Segi Pertumbuhan Teori Hukum Islam Indonesia*, Suara Muhammadiyah No 16. Th.16 Agustus, 1991, h.44

- (c). Oleh karena itu, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama RI tentang Pelaksanaan Inpres No 1/1991 tanggal 10 Juni 1991.⁷

Keputusan Menteri Agama ini semakin menunjukkan kesederajatan KHI dengan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang berlaku bagi umat Islam. Pengaturan lebih lanjut dimuat dalam Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan KHI.⁸

Eksistensi KHI secara yuridis adalah menjadi pegangan hakim di Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara, artinya perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU No. 14/1970 pasal 20 ayat (1) yang berbunyi : Hakim sebagai penegak Hukum dan keadilan wajib mengali mengikuti dan memahami nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Secara fungsional eksistensi KHI adalah Fikih Indonesia, karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Sebagaimana yang telah pernah dicetuskan oleh Prof. Hazairin, SH. Dan Prof. TM. Hasby Ash Shiddiqy sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal dapat disamakan dengan fikih *Hijazī*, fikih *Misrī*, fikih *Hindī*, fikih lain lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa mazhab baru tapi ia mempersatukan berbagai fikih dalam menjawab satu persoalan fikih. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Di dalam sistem hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia.

Dengan demikian KHI adalah hukum materil yang dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen yustisia atau buku kompilasi hukum Islam sehingga data dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara. Adapun materi KHI memuat tiga buku : Buku-I, yaitu : Hukum Perkawinan, yang terdiri dari XIX Bab, 170 Pasal.⁹ Buku-II, yaitu : Hukum Kewarisan, yang terdiri dari VI Bab, 214 Pasal. Buku-III, yaitu : Hukum Perwakafan, yang terdiri dari V Bab, 229 Pasal.¹⁰

⁷*Ibid*, h. 106

⁸*Ibid*

⁹Salah satu contoh Bab. IV pada KHI Pasal 14, yaitu Rukun Nikah, untuk melakukan perkawinan harus ada : a. calon suami, b. ada calon isteri, c. ada wali nikah, d. ada dua orang saksi, dan e. ada ijab dan qabul pada Bab. II, pasal 4 : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 6 Bab. II KHI, menyatakan : Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.

¹⁰Buku *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991, dan Putusan Menteri Agama RI, Nomor: 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991.

Latar Belakang Lahirnya CLD KHI dan Eksistensi

Latar belakang munculnya CLD KHI, berawal dari kelompok diskusi kecil dari beberapa orang seperti : Ahmad Suaedy, Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid, Anik Farida, Robin Bush dan Silvia Ranti. Mereka inilah sebagai perintis awal yang berkumpul di Kantor kerja Ahmad Suedy di Jakarta pada Mei 2003, mereka mendiskusikan berbagai isu penting di negeri ini pada saat itu dengan kuatnya arus politik formalisasi syariat Islam baik di tingkat nasional maupun daerah. Ini ditandai diantaranya diajukannya RUU Hukum Terapan Peradilan Agama. Menurut Marzuki Wahid, pada saat itu belum muncul nama Pokja PUG Depag sebagai lembaga yang melaksanakan CLD KHI, juga nama CLD KHI belum hadir dalam pemikiran mereka.¹¹

Marzuki Wahid menambahkan, dalam diskusi itu diakui bahwa kehadiran arus besar formalisasi syariat Islam merupakan efek samping dan resiko dari kran demokrasi yang dibuka lebar pasca kejatuhan rezim Orde Baru. Aspirasi memformalisasikan syariat Islam ke dalam tubuh negara adalah bagian dari euforia politik yang melanda masyarakat Indonesia ketika itu. Namun dalam pandangan kelompok diskusi bahwa substansi pemikiran formalisasi syariat Islam belum memiliki satu tawaran substansi hukum Islam yang ditransformasikan dalam regulasi baik tingkat pusat maupun daerah.¹²

Seperti yang ditulis Marzuki Wahid, kekhawatiran kelompok diskusi bahwa tuntutan formalisasi syariat Islam selain tidak sejalan dengan sistem hukum nasional, juga akan membuat diskriminasi terhadap masyarakat non muslim. Agenda formalisasi syariat Islam bila disetujui bisa menggoyahkan pilar pluralisme dan demokrasi dalam kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila.¹³ Dengan kata lain keinginan kelompok diskusi, setiap hukum Islam yang diregulasikan menjadi hukum positif harus dalam muatan pluralis, demokratis, humanis dan adil gender tetapi tetap diposisikan sebagai bagian dari hukum positif produk hukum nasional.

Ketika KHI Inpres No 1/1991 akan dinaikkan menjadi undang-undang yang diinisiatif oleh Departemen Agama yang bukan bagian dari kelompok pendukung formalisasi syariat Islam. Kelompok diskusi memandang sebuah persoalan urgen dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, artinya kelompok diskusi sepakat KHI Inpres No 1/1991 harus menjadi UU, namun supaya jangan terjebak dalam formalisasi syariat Islam mutlak, diperlukan pengkajian mendalam terhadap KHI-Inpres, menganalisis kembali fikih klasik sebagai literatur KHI, dan melakukan penelitian sosial untuk melihat kebutuhan masyarakat terhadap perubahan hukum perkawinan. Kemudian dirumuskan pemikiran baru tentang hukum kekeluargaan Islam yang benar-benar pluralis, demokratis, humanis dan adil gender sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

¹¹Marzuki Wahid, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Pasca Orde Baru Dalam Pendekatan Politik: Studi Kasus CLD-KHI. Dalam Generasi Baru Peneliti Muslim di Indonesia Kajian Islam Dalam Ragam Pendekatan Program PIES 2008-2009, op.cit.*, h. 27

¹²Menurut kelompok diskusi para pendukung formalisasi syariat Islam lebih banyak mendesak ketentuan umum syariat Islam, berupa ritualitas dan moralitas ajaran Islam seperti: kewajiban puasa, kewajiban zakat, membaca belajar al-Quran, shalat berjamaah, menutup aurat, pakaian muslim, pelarangan minum khamar, pelarangan prostitusi, dan lainnya. *Ibid.*, h. 28

¹³*Ibid.*, h. 12.

Untuk mengcaver ini diperlukan sebuah TIM yang intensif untuk mengkaji dan mendalami KHI, melalui rapat TIM pada tanggal 5 Juni 2003 dibentuk tim yang disebut dengan "TIM 10" yang terdiri dari : Muhammad Amin Suma, Siti Musdah Mulia, Syafiq Hasyim, Marzani Anwar, Marzuki Wahid, Amirsyah Tambunan, Ahmad Mubarak, Abd Moqsith Ghazali, Mesraini dan Anik Farida¹⁴ TIM 10 juga tidak dipandang kuat kalaulah dibentuk lembaga yang legalitas, kemudian dibentuk Pokja PUG sebagai payung hukum CLD – KHI, sengaja dibuat dalam satu atap Departemen Agama dan berkantor di gedung tujuannya semakin mudah mempengaruhi isi-isi dan poin-poin ketentuan hukum yang sedang dirancang tim RUUHTPA. Selain itu terbangunnya dialog, komunikasi dan pembahasan bersama antara TIM CLD – KHI dan TIM RUUHTPA tentang isu-isu dan materi hukum keluarga Islam lebih intensif.¹⁵

Pertanyaan yang muncul, kenapa KHI Inpres perlu dicounter dalam pembauran hukum kekeluargaan Islam oleh TIM CLD-KHI. Paling tidak menurut Marzuki Wahid ada tiga alasan :

1. KHI Inpres diajukan Departemen Agama RI untuk ditingkatkan statusnya menjadi RUUHTP. Bahkan buku ketiga dari KHI Inpres tentang Hukum Perwakafan (tahun 2004) telah ditetapkan menjadi UU Wakaf UU No 41/2004, atas dasar ini dalam konteks upaya mempengaruhi kebijakan hukum, KHI Inpres sudah saatnya direspon.¹⁶
2. KHI Inpres adalah satu-satunya ketentuan detil syariat Islam yang telah diakui negara dan sering dijadikan rujukan para hakim Pengadilan agama, Pejabat KUA dan sebagian masyarakat. Selain mudah dipahami terurai dalam bentuk pasal, KHI Inpres memberikan kepastian hukum karena menawarkan pilihan hukum dalam perspektif fiqh mazhab.¹⁷
3. Terdapat beberapa kelemahan materi KHI Inpres yaitu : *Pertama*, kelemahan pokok pada rumusan visi dan misi, terdapat beberapa pasal KHI Inpres bertentangan dengan prinsip dasar Islam universal seperti : *al-Musawwah, al-ukhuwah, al-'adalah*, dan lainnya. *Kedua*, sejumlah pasal tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Konvensi internasional yang telah diratifikasi. Seperti : Hasil amendemen UUD 1945, UU No 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU No 39/1999 tentang HAM, UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dll. *Ketiga*, pada aspek metodologi masih terlihat replika hukum fiqh ulama klasik, belum mencerminkan kerangka konstruksi hukum Islam dalam konteks masyarakat Indonesia.¹⁸

Ketika TIM CLD-KHI menggagas pentingnya pembauran terhadap KHI Inpres, bukanlah hanya sekedar gagasan pemikiran sesaat, tetapi melalui proses waktu yang panjang. Selama hampir dua tahun 2003-2004 naskah CLD KHI disusun

¹⁴*Ibid.*, h. 30

¹⁵Awalnya sebelum diputuskan Pokja PUG Depag beberapa lembaga juga menjadi pilihan seperti Fahmina Institut, Lembaga Kajian Agama dan Gender (LKAJ) dan *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*. *Ibid.*, h. 29

¹⁶*Ibid.*, h. 13

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*, h. 14.

dalam buku setebal 125 halaman. CLD KHI tidak saja memuat pasal-pasal menjadi tawaran pokok pemikirannya, melainkan juga menegaskan latar belakang, agenda dan cita-cita serta mekanisme dan metode penyusunan hukum Islam dalam bab pendahuluan, serta naskah akademik dalam dua bab dua judul "Menuju Kompilasi Hukum Islam yang Pluralis dan Demokratis".¹⁹ Artinya dari aspek waktu dan materi TIM CLD-KHI menyadari penyusunan naskah CLD KHI membutuhkan waktu yang lama dan menawarkan pembaharuan materi yang refresentatif sesuai dengan isu demogratis, pluralis dan adil gender.

Dari aspek kontributor TIM CLD KHI, melibatkan sejumlah tokoh terdiri ulama, pakar, akademisi dan LSM sebagai kontributor yang mereka benar-benar latar belakang Islamic studies mulai dari pesantren sampai latar belakang pendidikan IAIN dan UIN. Sehingga terlihat para kontributor paham betul tentang hukum Islam, isu-isu perempuan dan gender. Ini dirancang memperkuat nalar pembaharuan dari isu-isu yang dikembangkan dalam CLD-KHI. Sebagaimana dijabarkan oleh Marzuki Wahid²⁰ para kontributor CLD – KHI di bawah ini :

Tabel 1
TIM CLD KHI
Pendidikan, Profesi & Organisasi

No	Kontributor	Pendidikan	Profesi	Organisasi
1	Siti Musdah Mulia	Pesantren As'adiyyah IAIN Makasar (S.1) IAIN Jakarta (S2-S3)	Staf Ahli Menteri Agama RI, Dosen UIN Jakarta	Pokja PUG Depag RI, MUI Pusat, ICRP, LKAJ
2	Marzuki Wahid	Pesantren Babakan Cirebon, Pesantren Situbondo, IAIN Sitibundo (S.1), IAIN Jakarta (S2-S3).	Staf Departemen Agama RI, Dosen UIN Bandung	Jaringan Islam Liberal (JIL), The Wahid Institut, PP Lakpesdam Jakarta.
3	Abd Moqsiith Ghazali	Pesantren Zainul Huda Sumenep, Pesanteren Situbundo, IAIN Sitibundo (S.1) dan IAIN Jakarta (S2-S3)	Dosen Universitas Paramadina Mulya Jakarta	JIL, The Wahid Institut, PP Lapesdam Jakarta
4	Anik Farida	UGM Yogya (S1), UI Jakarta (S2)	Peneliti Balitbang Departemen Agama	Pokja PUG Depag, LKAJ, ICRP
5	Saleh Partaonan Dly	USU Medan (S1), IAIN Jakarta (S2), UIN Jakarta (S3) dan Pesanteren YAPI	Dosen STAI Madinatul Ilmi Jakarta	Pokja PUG Depag, LKAJ, ICRP

¹⁹*Ibid*, h. 23

²⁰*Ibid*, h. 30-31

		Sibuhuan		
6	Ahmad Suedy	Pesanteren Karapyak Yogya, IAIN Yogya (S1)	Peneliti The Wahid Institut	The Wahid Institut, Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LkiS)
7	Marzani Anwar	IAIN Yogya (S1)	Peneliti Balitbang Depag	LKAJ, LP3ES, P3M Jakarta
8	Abdurrahman Abdullah	UI Jakarta (S1), Iran (S2), IAIN Jakarta (S3)	Dosen STAIMI Jakarta	
9	Ahmad Mubarak	Pesanteren Kesugihan Cilacap, Pesanteren Miftahul Huda Purwokerto, IAIN Jakarta (S1-S3)	Dosen Universitas Islam Jakarta, UI dan UIN Jakarta	MUI Pusat
10	Amirsyah Tambunan	IAIN Sumut Medan (S1), IAIN Jakarta (S2-S3)	Dosen UIN Jakarta	MUI Pusat, PP Muhammadiyah Jakarta
11	Asep Taufik Akbar	Pesanteren Sitobundo, IAI Sitobundo (S1), IAIN Jakarta (S2)	Dosen STAINU Jakarta	

Memperhatikan para kontributor mulai dari pendidikan, profesi dan organisasi, sebenarnya mereka adalah akademisi, peneliti dan pengajar, memang mereka sehari-hari bergulat di bidangnya, menjadi pertimbangan utama bahwa penyusunan legal drafting CLD KHI memang benar-benar melibatkan sejumlah pihak yang memiliki kompetensi.

Selain kontributor, aspek metodologi juga hal yang mendasar dalam penyusunan legal drafting CLD KHI. Marzuki Wahid kembali mengatakan CLD KHI dilakukan dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bertahap, sistematis dan melibatkan sejumlah pihak yang memiliki kompetensi. Ini terlihat dari kegiatan diantaranya : Melakukan review (Pengkajian ulang) KHI Inpres.²¹ Melakukan studi literatur klasik.²² Studi lapangan di lima daerah (Sulawesi Selatan, Sumatera

²¹Melakukan review (Pengkajian ulang) KHI Inpres sebagaimana ditegaskan Anik Farida adalah hal penting dilakukan untuk menemukan posisi masalah dan rumusan yang akan dilakukan. Terdapat 8 pokok persoalan yang penting untuk dikaji : (1). Posisi KHI dalam kerangka hukum nasional dan internasional, oleh : Siti Musdah Mulia (2). KHI perspektif politik hukum, oleh : Marzuki Wahid. (3). KHI dalam efistemologi ushul fiqh dan kaidah fiqh, oleh : Abd Muqsiith Ghazali (4). KHI dalam timbangan prinsip-prinsip dan nilai landasan filsafat Islam, oleh: Abdurrahman Abdullah. (5). Perbandingan Pendekatan dalam merumuskan hukum keluarga di Indonesia dan negara Islam lain, oleh : Partaonan Dly. (6). Masalah Hukum Kewarisan, oleh : Marzani Anwar. (7). Masalah Hukum Perwakafan, oleh : Amirsyah Tambunan. (8). Masalah – masalah Perkawinan, oleh : Mesraini. *Ibid*, h. 34

²²Terdapat 41 kitab kuning klasik dan kontenporer (Kitab fiqh, tafsir, hadis, usul fiqh, qawaid fiqh) yang dibaca, dianalisis untuk dijadikan references dalam tawaran pembaharuan hukum

Barat, Jawa Barat, Aceh dan Nusa Tenggara Barat). Pengujian ilmiah dan penyerapan pendapat ulama dan ahli hukum serta melakukan deseminasi hasil dan pengujian publik).²³ Berbagai langkah-langkah ini dilakukan untuk mempertajam metodologi dalam penyusunan legal drafting CLD KHI.

Substansi Pemikiran CLD KHI dan KHI Inpres No 1991 dalam Hukum Perkawinan

Rancangan draft CLD KHI terdiri dari tiga bidang hukum, yaitu : Hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Dibandingkan dengan KHI Inpres hampir sama perbedaannya terlihat KHI Inpres memilahnya dengan bidang hukum, CLD KHI memilahnya dalam RUU masing-masing. Marzuki Wahid merincikan sistematika CLD KHI kepada :

1. Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, agenda dan cita-cita hukum CLD KHI, serta metode dan mekanisme pembahasan hukum yang telah dilakukan TIM CLD-KHI.
2. Bab II Naskah Akademik dengan judul "Menuju Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia yang pluralis dan demokratis". Dalam naskah ini dijelaskan titik tolak dan argumentasi-argumentasi bersifat filosofis, sosiologis, yuridis maupun teologis, mengapa CLD KHI penting disusun. Selain itu diuraikan pula filosofis dan prinsip dasar yang digunakan Tim dalam menyusun CLD KHI
3. Bab III Materi Counter Legal Draft KHI Baru terdiri dari :
 - a. Buku I : RUU Hukum Perkawinan Islam, memuat 19 bab 116 pasal dan penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal
 - b. Buku II : RUU Hukum Kewarisan Islam, memuat 8 bab, 42 pasal dan penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal
 - c. Buku III : RUU Hukum Perwakafan Islam, memuat 5 bab 20 pasal dan penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal.²⁴

Karena topik pembahasan ini adalah aspek hukum perkawinan, penulis membatasi diri menganalisis tawaran rumusan hukum Islam baru tentang hukum

keluarga Islam versi CLD-KHI, di antaranya : Kitab fiqh seperti: *Bidayah al-Mujtahid* (Ibn Rusyd), *al-Fiqh Islāmī wa 'Adillatuh* (Wahbah al-Zuhailī), *Fiqh Sunnah* (Sayyid Sabiq), *al-Mubazzab* (al-Fairuz al-Abadī al-Syairāzī), *al-Majmu'* (al-Nawāwī), *al-Mawarits* ('Alī al-Ṣabunī), dan lainnya. Kitab usul fiqh terdapat seperti: *al-Muwafaqah min Uṣūl al-Syari'ah* (al-Syatībī), *al-Muṣtaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* (al-Ghazālī), *Qawaid al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* ('Iz al-Dīn Ibn 'Abd Salām), *I'lam al-Muwaqqin an-Rab al-'Alāmīn* (Ibn Qayyim al-Jawziyyah), dan lain. Kitab qawaid fiqh, seperti : *al-Madkhal ilā Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubrā* (Ibrahīm Muḥammad Maḥmūd al-Ḥarirī) dan *al-Aybab wa an-Nazair* (al-Suyūṭī). Kitab Tafsir seperti : *al-Itqan fī 'Ulūm al-Qur'ān* (al-Suyūṭī), *Tafsīr al-Manār* (Muḥammad bin Rasyd Riḍā), *Tafsīr al-Aḥkām* ('Alī al-Sāyis), dan lain. Kitab Hadis seperti: *Syarḥ al-Muslīm* (Musā Syahin Latsin), *Fath Barrī* (Ibn Ḥajar al-Asqalanī), *Nayl al-Auṭar* (al-Syaukānī), *subul al-Salām* (Muḥammad bin Islāmī al-Ṣan'anī). *Ibid.*, h. 36-37.

²³*Ibid.*, h. 33

²⁴*Ibid.*, h. 24.

perkawinan, paling tidak tercatat 18 point penting pemikiran CLD KHI yang perlu dikaji dan dianalisis sebagai berikut :

1. Kategori Perkawinan. Menurut CLD KHI perkawinan bukan merupakan ibadah, melainkan muamalah, sebagai kontrak didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Ini dijelaskan pada pasal 2.
2. Wali Nikah. Menurut CLD KHI wali nikah Tidak termasuk rukun perkawinan ; diperlukan bagi calon pasangan yang belum cakap melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana termuat pasal 6-7.
3. Pencatatan nikah. Bagi CLD KHI pencatatan nikah termasuk rukun perkawinan, kewajiban pemerintah untuk mencatat perkawinan, sebagaimana tertera pasal 6
4. Kesaksian perempuan dalam perkawinan. Dalam pandangan CLD KHI, perempuan boleh menjadi saksi pernikahan sebagaimana laki-laki, sebagaimana dijelaskan pasal 11
5. Batas minimal usia perkawinan. Menurut CLD KHI minimal usia 19 tahun tidak membedakan antara usia calon isteri dan calon suami (Pasal 7)
6. Perkawinan seorang gadis (Perempuan yang belum pernah kawin). Menurut CLD KHI, gadis umur 21 tahun dapat mengawini dirinya sendiri (Pasal 7)
7. Mahar. Menurut CLD KHI, mahar bisa diberikan oleh calon isteri kepada calon suami atau sebaliknya sesuai dengan adat yang berlaku (Pasal 16)
8. Kedudukan suami isteri. Menurut CLD KHI, kedudukan hak dan kewajiban suami dan isteri adalah setara (Pasal 49) Suami atau isteri bisa menjadi kepala keluarga atau ibu rumah tangga sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
9. Pencarian nafkah. Menurut CLD KHI, kewajiban bersama suami isteri (Pasal 51)
10. Perjanjian masa perkawinan. Menurut CLD KHI, diatur sehingga perkawinan dinyatakan putus bersamaan dengan berakhirnya masa perkawinan yang disepakati (Pasal 22, 28 dan 56 point a)
11. Kawin beda agama. Menurut CLD KHI, Hukumnya boleh, selama dimaksudkan untuk mencapai tujuan perkawinan (Pasal 3).
12. Poligami. Menurut CLD KHI, hukumnya tidak boleh, haram lighairihi (Pasal 3).
13. Iddah. Menurut CLD KHI, iddah berlaku bagi suami isteri (Pasal 88)
14. Iddah akibat perceraian. Menurut CLD KHI, iddah berlaku bagi suami isteri (Pasal 88)
15. Ihdad (Berkabung). Menurut CLD KHI, selain isteri, ihdad juga dikenakan buat suami (Pasal 112)
16. Nusyuz (Membangkang dari kewajiban. Menurut CLD KHI, nusyuz juga bisa dilakukan suami (Pasal 53 ayat 1)
17. Khulu' (Perceraian inisiatif isteri). Menurut CLD KHI, khulu' dan thalaq adalah sama, sehingga boleh rujuk (talak raj'iy) Pasal 1 dan 59.
18. Hak rujuk (bersatu kembali dalam perkawinan). Menurut CLD KHI, suami dan isteri memiliki hak untuk rujuk (Pasal 105)

Hukum Perkawinan

No	Topik	CLD KHI	KHI INPRES No 1991
1	Perkawinan	Perkawinan bukan dipandang ibadah, melainkan muamalah, sebagai kontrak didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak (Pasal 2)	Pelaksanaan perkawinan merupakan ibadah (Pasal 2).
2	Wali nikah	Tidak termasuk rukun perkawinan ; diperlukan bagi calon pasangan yang belum cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 6-7)	Termasuk rukun perkawinan (Pasal 7)
3	Pencatatan Nikah	Termasuk rukun perkawinan, kewajiban pemerintah untuk mencatat perkawinan (Pasal 6)	Tidak termasuk rukun perkawinan
4	Saksi Perempuan dalam pernikahan	Perempuan boleh menjadi saksi pernikahan sebagaimana laki-laki (Pasal 11)	Perempuan tidak boleh menjadi saksi
5	Batas minimal usia perkawinan	Minimal usis 19 tahun tidak membedakan antara usia calon isteri dan calon suami (Pasal 7)	Usia 16 tahun bagi calon isteri dan 19 tahun bagi calon suami (Pasal 15)
6	Perkawinan seorang gadis (Perempuan yang belum pernah kawin)	Gadis umur 21 tahun dapat mengawini dirinya sendiri (Pasal 7)	Berapapun usianya, gadis dikawinkan oleh wali atau yang mewakilinya (Pasal 14)
7	Mahar	Mahar bisa diberikan oleh calon isteri kepada calon suami atau sebaliknya sesuai dengan adat yang berlaku (Pasal 16)	Diberikan oleh calon suami kepada calon isteri (Pasal 30)
8	Kedudukan suami kepada isteri	Kedudukan hak dan kewajiban suami dan isteri adalah setara (Pasal 49) Suami atau isteri bisa menjadi kepala keluarga atau ibu rumah tangga	Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga (Pasal 80 ayat 4).

		sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama	
9	Pencarian nafkah	Kewajiban bersama suami isteri (Pasal 51)	Kewajiban suami (Pasal 60 ayat 4)
10	Perjanjian masa perkawinan	Diatur, sehingga perkawinan dinyatakan putus bersamaan dengan berakhirnya masa perkawinan yang disepakati (Pasal 22, 28 dan 56 point a)	Tidak diatur
11	Kawin beda agama	Hukumnya boleh, selama dimaksudkan untuk mencapai tujuan perkawinan	Hukumnya mutlak tidak boleh
12	Poligami	Hukumnya tidak boleh, haram lighairihi (Pasal 3)	Hukumnya boleh dengan sejumlah persyaratan (Pasal 55-59)
13	Iddah	Iddah berlaku bagi suami isteri (Pasal 88)	Iddah hanya untuk isteri (Pasal 153)
14	Iddah akibat perceraian	Didasarkan pada terjadinya akad, bukan dukhul (Pasal 88)	Didasarkan pada terjadinya dukhul (Pasal 153)
15	Ihdad (berkabung)	Selain isteri, ihdad juga dikenakan buat suami (Pasal 112)	Ihdad hanya untuk isteri (Pasal 170)
16	Nusyuz	Nusyuz juga bisa dilakukan suami (Pasal 53 ayat 1)	Nusyuz hanya dimungkinkan oleh isteri (Pasal 84)
17	Khulu'	Khulu' dan talak adalah sama, sehingga boleh rujuk (talak raj'iy) Pasal 1 dan 59	Khulu' dinyatakan sebagai thalaq bain suqhra, sehingga tidak boleh rujuk melainkan harus dengan akad nikah baru (Pasal 119)
18	Hak rujuk	Suami dan isteri memiliki hak untuk rujuk (Pasal 105)	Hak rujuk hanya dimiliki oleh suami (Pasal 163).

Penutup

Rancangan naskah tentang Hukum Keluarga Islam, RUU Hukum Kewarisan Islam dan RUU Hukum Perwakafan Islam versi CLD-KHI dibekukan oleh Menteri Agama yang saat itu Muhammad Maftuh Basyuni, sehingga terkubur sampai saat ini, namun dalam konteks akademisi, cukup menarik kembali didiskusikan. Paling tidak

pemikiran seperti ini harus dilihat lebih tajam dari pesan dan konteks apa yang akan disampaikan oleh pemikirnya, kemudian metodologi yang dibangun, sehingga kita tidak terlalu cepat terprovokasi untuk menolak, begitu juga tidak terlalu mudah untuk menerima. Perlu ada proses pemikiran yang berkembang walaupun pada akhirnya ada yang menolak atau menerima pemikiran CLD KHI.[]

Bibliografi

- Departemen Agama RI, Dir. Jend. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Buku KHI di Indonesia*, Tahun 2000.
- Rosyadi, A. & M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006).
- Sunny, Ismail, *KHI Ditinjau Dari Segi Pertumbuhan Teori Hukum Islam Indonesia*, Suara Muhammadiyah No 16. Th.16 Agustus, 1991.
- Wahid, Marzuki, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Pasca Orde Baru Dalam Pendekatan Politik : Studi Kasus CLD-KHI. Dalam Generasi Baru Peneliti Muslim di Indonesia Kajian Islam Dalam Ragam Pendekatan Program PIES 2008-2009* (Purwokerto : Australia – Indonesia Institut, 2010).

Transformasi Kebudayaan Persia dalam Kebudayaan Arab

Oleh: M. Yakub

Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Sumatera Utara
yakub.aminn@yahoo.com

Abstract

Cultural interactions between Persia and Islam occurred through numerous ways, such as expansion process (expansion of region by way of invasion). Through this process, Persia enriched the diversity of Arabic-Islam cultures which can be seen among others in implementation of administration of state institutions (*wizārah*) which was a unique feature of Persia during the time when Abbasid Dynasty was in reign. Relocation of Abbasid capital from Damasqus to Baghdad and translation activities formed an intense acculturation among the two cultures which resulted in the growth and advancement of sciences. This was incited by the development of Arabic language, both as a language of administration and language of science.

Kata Kunci: Persia, Arab, Dinasti Abbasiyah, dan Wazir.

Pendahuluan

Sejarah negara dan bangsa Persia bisa dikatakan dimulai sejak tahun 5000 SM.¹ Ketika itu tanah dataran tinggi Iran sudah mulai dihuni. Awal tahun 100 SM terjadi penyerbuan bangsa Persia dan Media. Bangsa Persia menduduki daerah selatan. Dinasti Akhaemenia memerintah daerah ini pada abad ke-6 SM sampai abad ke-3 SM selaku Vazal dari raja-raja Media dengan rajanya yang terkenal Darius Kikasarus dan putranya Cyrus.² Raja terakhir dinasti ini, Darius III Codamanus (336-331 SM) ditaklukkan oleh bangsa Macedonia di bawah Alexander The Great. Kemudian wilayah ini dikuasai oleh Dinasti Selucia yang tidak berumur panjang.³ Setelah itu, terdapat dua kerajaan yang berkuasa secara berturut-turut, yaitu Hastasapas dan Sasania.⁴

Pada tahun 637 M Dinasti Sasania di Persia ditaklukkan bangsa Arab (Islam), kemudian menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam. Interaksi antara kebudayaan Persia dan Arab-Islam terlihat pada periode pertama Dinasti Abbasiyah 132 H/750 M sampai 232 H/847 M atau yang disebut dengan periode pengaruh Persia pertama.⁵ Khalifah Abū Ja'far al-Manṣūr memindahkan ibukota negara dari Damaskus ke Hasyimiyah kemudian ke kota yang baru dibangunnya yaitu, Baghdad, berdekatan dengan bekas ibukota Dinasti Sasania Persia, Ctesiphon pada tahun 762

¹Hasan Shadily, ed., *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru-van Hoeve, edisi khusus 1991), III, h. 1480.

²Orang Arab menyebutnya kisra. Sebutan ini pula yang diberikan kepada raja-raja Persia. Lihat *Ensiklopedi Indonesia*, h. 2686.

³Shadily, ed., *Ensiklopedi*, h. 2686

⁴*Ibid*, h. 1482.

⁵Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 49.